



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-116/PK/2020 18 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Yth. (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana terlampir)

Dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk Penyaluran dan Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mengalokasikan alokasi DID kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau APBD-P untuk belanja di bidang kesehatan.
 - b. Belanja wajib bidang kesehatan tersebut diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*.
 - c. Pemda yang menerima DID diluar Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan, penggunaannya tetap diprioritaskan untuk pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*.
 - d. Penyaluran DID Tahap I TA 2020 dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juni dengan ketentuan:
 - 1) Alokasi DID untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan akan disalurkan sekaligus sebesar 100%.
 - 2) Alokasi DID selain untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan akan disalurkan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID.
3. Berdasarkan hal tersebut, diminta kerja sama dari Pemerintah Daerah untuk dapat:
 - a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DID TA 2019 untuk Pemda yang mendapat alokasi DID TA 2019;
 - b. Menyusun kembali Rencana Penggunaan DID TA 2020 dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*;
 - c. Dalam hal dialihkan penggunaannya ke Kelompok Kategori lainnya, maka Pemda harus melampirkan Surat Pernyataan dengan melampirkan DPA yang memuat kegiatan pencegahan dan/atau penanganan corona telah dianggarkan dalam APBD;
4. Mekanisme Penyampaian dan Pelaporan DID sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 10/PK/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Penyaluran Dana Insentif Daerah.

Sebagai tambahan informasi, dapat disampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



LAMPIRAN

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan

Nomor : S- /PK/2020

Tanggal : Maret 2020

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Barat
3. Bupati Aceh Besar
4. Bupati Aceh Selatan
5. Bupati Aceh Tengah
6. Bupati Aceh Tenggara
7. Bupati Aceh Timur
8. Bupati Aceh Utara
9. Bupati Bireuen
10. Bupati Simeulue
11. Walikota Banda Aceh
12. Walikota Sabang
13. Walikota Lhokseumawe
14. Bupati Gayo Lues
15. Bupati Aceh Barat Daya
16. Bupati Aceh Jaya
17. Bupati Nagan Raya
18. Bupati Aceh Tamiang
19. Bupati Pidie Jaya
20. Walikota Subulussalam
21. Bupati Asahan
22. Bupati Dairi
23. Bupati Deli Serdang
24. Bupati Tapanuli Selatan
25. Bupati Tapanuli Utara
26. Bupati Toba Samosir
27. Walikota Binjai
28. Walikota Sibolga
29. Walikota Tebing Tinggi
30. Bupati Humbang Hasundutan
31. Bupati Serdang Bedagai
32. Bupati Samosir
33. Bupati Batu Bara
34. Bupati Padang Lawas Utara
35. Bupati Labuhanbatu Selatan
36. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
37. Bupati Limapuluh Kota
38. Bupati Agam
39. Bupati Kepulauan Mentawai
40. Bupati Pasaman
41. Bupati Pesisir Selatan
42. Bupati Sijunjung
43. Bupati Solok
44. Bupati Tanah Datar
45. Walikota Bukit Tinggi
46. Walikota Padang Panjang
47. Walikota Padang
48. Walikota Payakumbuh
49. Walikota Solok
50. Walikota Pariaman
51. Bupati Pasaman Barat
52. Bupati Dharmasraya
53. Bupati Solok Selatan
54. Gubernur Provinsi Riau
55. Bupati Bengkalis
56. Bupati Indragiri Hilir
57. Bupati Indragiri Hulu
58. Bupati Kampar
59. Bupati Kuantan Singingi
60. Bupati Pelalawan
61. Bupati Rokan Hilir
62. Bupati Rokan Hulu
63. Bupati Siak
64. Walikota Dumai
65. Walikota Pekanbaru
66. Bupati Kepulauan Meranti
67. Gubernur Provinsi Jambi
68. Bupati Batang Hari
69. Bupati Bungo
70. Bupati Kerinci
71. Bupati Muaro Jambi
72. Bupati Sarolangun
73. Bupati Tanjung Jabung Barat
74. Bupati Tanjung Jabung Timur
75. Bupati Tebo
76. Walikota Jambi
77. Walikota Sungai Penuh
78. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
79. Bupati Lahat
80. Bupati Musi Banyuasin
81. Bupati Musi Rawas
82. Bupati Muara Enim
83. Bupati Ogan Komering Ilir
84. Bupati Ogan Komering Ulu
85. Walikota Palembang
86. Walikota Prabumulih
87. Walikota Pagar Alam
88. Walikota Lubuk Linggau
89. Bupati Banyuasin
90. Bupati Ogan Ilir
91. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
92. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

93. Bupati Empat Lawang
94. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
95. Bupati Musi Rawas Utara
96. Gubernur Provinsi Bengkulu
97. Bupati Bengkulu Utara
98. Bupati Rejang Lebong
99. Walikota Bengkulu
100. Bupati Mukomuko
101. Bupati Lebong
102. Bupati Kepahiang
103. Gubernur Provinsi Lampung
104. Bupati Lampung Barat
105. Bupati Lampung Selatan
106. Bupati Lampung Tengah
107. Bupati Lampung Utara
108. Bupati Lampung Timur
109. Bupati Tanggamus
110. Bupati Tulang Bawang
111. Bupati Way Kanan
112. Walikota Bandar Lampung
113. Walikota Metro
114. Bupati Pesawaran
115. Bupati Pringsewu
116. Bupati Tulang Bawang Barat
117. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
118. Bupati Bandung
119. Bupati Bekasi
120. Bupati Bogor
121. Bupati Ciamis
122. Bupati Cirebon
123. Bupati Garut
124. Bupati Indramayu
125. Bupati Karawang
126. Bupati Kuningan
127. Bupati Majalengka
128. Bupati Purwakarta
129. Bupati Subang
130. Bupati Sukabumi
131. Bupati Sumedang
132. Walikota Bandung
133. Walikota Bekasi
134. Walikota Bogor
135. Walikota Cirebon
136. Walikota Depok
137. Walikota Sukabumi
138. Walikota Tasikmalaya
139. Walikota Cimahi
140. Walikota Banjar
141. Bupati Pangandaran
142. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
143. Bupati Banjarnegara
144. Bupati Banyumas
145. Bupati Batang
146. Bupati Blora
147. Bupati Boyolali
148. Bupati Cilacap
149. Bupati Demak
150. Bupati Grobogan
151. Bupati Jepara
152. Bupati Karanganyar
153. Bupati Kebumen
154. Bupati Kendal
155. Bupati Klaten
156. Bupati Kudus
157. Bupati Magelang
158. Bupati Pati
159. Bupati Pekalongan
160. Bupati Pemalang
161. Bupati Purbalingga
162. Bupati Purworejo
163. Bupati Rembang
164. Bupati Semarang
165. Bupati Sragen
166. Bupati Sukoharjo
167. Bupati Tegal
168. Bupati Temanggung
169. Bupati Wonogiri
170. Bupati Wonosobo
171. Walikota Magelang
172. Walikota Pekalongan
173. Walikota Salatiga
174. Walikota Semarang
175. Walikota Surakarta
176. Walikota Tegal
177. Gubernur Provinsi DI Yogyakarta
178. Bupati Bantul
179. Bupati Gunung Kidul
180. Bupati Kulon Progo
181. Bupati Sleman
182. Walikota Yogyakarta
183. Gubernur Provinsi Jawa Timur
184. Bupati Bangkalan

185. Bupati Banyuwangi
186. Bupati Blitar
187. Bupati Bojonegoro
188. Bupati Bondowoso
189. Bupati Gresik
190. Bupati Jombang
191. Bupati Kediri
192. Bupati Lamongan
193. Bupati Lumajang
194. Bupati Madiun
195. Bupati Magetan
196. Bupati Malang
197. Bupati Mojokerto
198. Bupati Nganjuk
199. Bupati Ngawi
200. Bupati Pacitan
201. Bupati Pamekasan
202. Bupati Pasuruan
203. Bupati Ponorogo
204. Bupati Probolinggo
205. Bupati Sampang
206. Bupati Sidoarjo
207. Bupati Situbondo
208. Bupati Sumenep
209. Bupati Trenggalek
210. Bupati Tuban
211. Walikota Blitar
212. Walikota Kediri
213. Walikota Madiun
214. Walikota Malang
215. Walikota Mojokerto
216. Walikota Probolinggo
217. Walikota Surabaya
218. Walikota Batu
219. Bupati Landak
220. Bupati Kapuas Hulu
221. Bupati Ketapang
222. Bupati Mempawah
223. Bupati Sambas
224. Bupati Sanggau
225. Bupati Sintang
226. Walikota Pontianak
227. Walikota Singkawang
228. Bupati Sekadau
229. Bupati Kubu Raya
230. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
231. Bupati Barito Selatan
232. Bupati Barito Utara
233. Bupati Kapuas
234. Bupati Kotawaringin Barat
235. Bupati Kotawaringin Timur
236. Walikota Palangkaraya
237. Bupati Katingan
238. Bupati Sukamara
239. Bupati Lamandau
240. Bupati Gunung Mas
241. Bupati Pulang Pisau
242. Bupati Murung Raya
243. Bupati Barito Timur
244. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
245. Bupati Banjar
246. Bupati Barito Kuala
247. Bupati Hulu Sungai Selatan
248. Bupati Hulu Sungai Tengah
249. Bupati Hulu Sungai Utara
250. Bupati Kotabaru
251. Bupati Tabalong
252. Bupati Tanah Laut
253. Bupati Tapin
254. Walikota Banjarbaru
255. Walikota Banjarmasin
256. Bupati Balangan
257. Bupati Tanah Bumbu
258. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
259. Bupati Berau
260. Bupati Kutai Kartanegara
261. Bupati Kutai Barat
262. Bupati Kutai Timur
263. Bupati Paser
264. Walikota Balikpapan
265. Walikota Bontang
266. Walikota Samarinda
267. Bupati Penajam Paser Utara
268. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
269. Bupati Minahasa
270. Bupati Kepulauan Sangihe
271. Walikota Bitung
272. Walikota Manado
273. Bupati Kepulauan Talaud
274. Bupati Minahasa Selatan
275. Walikota Tomohon
276. Bupati Minahasa Utara

277. Bupati Kep. Siau Tagulandang Biaro
278. Walikota Kotamobagu
279. Bupati Bolaang Mongondow Utara
280. Bupati Minahasa Tenggara
281. Bupati Bolaang Mongondow Timur
282. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
283. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
284. Bupati Buol
285. Bupati Morowali
286. Bupati Poso
287. Walikota Palu
288. Bupati Parigi Moutong
289. Bupati Tojo Una Una
290. Bupati Sigi
291. Bupati Banggai Laut
292. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
293. Bupati Bantaeng
294. Bupati Barru
295. Bupati Bone
296. Bupati Bulukumba
297. Bupati Enrekang
298. Bupati Gowa
299. Bupati Luwu
300. Bupati Luwu Utara
301. Bupati Maros
302. Walikota Palopo
303. Bupati Pinrang
304. Bupati Kepulauan Selayar
305. Bupati Sidenreng Rappang
306. Bupati Soppeng
307. Bupati Wajo
308. Walikota Makassar
309. Bupati Toraja Utara
310. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
311. Bupati Buton
312. Bupati Konawe
313. Bupati Kolaka
314. Walikota Kendari
315. Walikota Bau-bau
316. Bupati Konawe Selatan
317. Bupati Bombana
318. Bupati Kolaka Utara
319. Bupati Konawe Utara
320. Bupati Buton Utara
321. Bupati Kolaka Timur
322. Bupati Muna Barat
323. Bupati Buton Tengah
324. Bupati Buton Selatan
325. Gubernur Provinsi Bali
326. Bupati Badung
327. Bupati Bangli
328. Bupati Buleleng
329. Bupati Gianyar
330. Bupati Jembrana
331. Bupati Karangasem
332. Bupati Klungkung
333. Bupati Tabanan
334. Walikota Denpasar
335. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
336. Bupati Bima
337. Bupati Dompu
338. Bupati Lombok Barat
339. Bupati Lombok Tengah
340. Bupati Lombok Timur
341. Bupati Sumbawa
342. Walikota Mataram
343. Walikota Bima
344. Bupati Sumbawa Barat
345. Bupati Lombok Utara
346. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
347. Bupati Belu
348. Bupati Manggarai
349. Bupati Ngada
350. Bupati Sumba Timur
351. Bupati Manggarai Barat
352. Bupati Manggarai Timur
353. Bupati Maluku Tenggara Barat
354. Bupati Maluku Tengah
355. Bupati Maluku Tenggara
356. Bupati Buru
357. Walikota Ambon
358. Walikota Tual
359. Bupati Jayapura
360. Bupati Mimika
361. Bupati Nabire
362. Walikota Jayapura
363. Bupati Yalimo
364. Bupati Halmahera Tengah
365. Walikota Ternate
366. Bupati Halmahera Barat
367. Bupati Halmahera Timur
368. Bupati Halmahera Utara

369. Walikota Tidore Kepulauan
370. Bupati Pulau Morotai
371. Gubernur Provinsi Banten
372. Bupati Lebak
373. Bupati Pandeglang
374. Bupati Serang
375. Bupati Tangerang
376. Walikota Cilegon
377. Walikota Tangerang
378. Walikota Serang
379. Walikota Tangerang Selatan
380. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
381. Bupati Bangka
382. Walikota Pangkal Pinang
383. Bupati Bangka Tengah
384. Gubernur Provinsi Gorontalo
385. Bupati Boalemo
386. Bupati Gorontalo
387. Walikota Gorontalo
388. Bupati Pohuwato
389. Bupati Bone Bolango
390. Bupati Gorontalo Utara
391. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
392. Bupati Natuna
393. Bupati Kepulauan Anambas
394. Bupati Karimun
395. Walikota Batam
396. Walikota Tanjung Pinang
397. Bupati Lingga
398. Bupati Bintan
399. Gubernur Provinsi Papua Barat
400. Bupati Fak Fak
401. Bupati Sorong
402. Bupati Raja Ampat
403. Bupati Sorong Selatan
404. Bupati Teluk Bintuni
405. Bupati Teluk Wondama
406. Bupati Kaimana
407. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
408. Bupati Majene
409. Bupati Polewali Mandar
410. Bupati Mamasa
411. Bupati Mamuju Utara
412. Bupati Mamuju Tengah
413. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
414. Bupati Malinau
415. Bupati Nunukan
416. Bupati Tana Tidung

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

